

**Peran Muslim Sunni Moderat Dalam
Menangkal Gerakan Ektrimisme Jama'at
Nusrat Al-Islam Wal-Muslimin (JNIM)
Di Pantai Gading**

Riski Taufikur Rahman

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya

Email: riskialfarisi167@gmail.com

Irfan Fauzi

Universitas PTIQ, Jakarta

Email: irfanfauzi@mhs.ptiq.ac.id

Naufalun Ni'am

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Email: naufal.niam1@gmail.com

Article History

Submitted: 12 Mei 2026

Revised: 20 Mei 2026

Accepted: 06 Juni 2026

How to Cite:

Rahman, Riski Taufikur, Irfan Fauzi, dan Naufalun Ni'am. "Peran Muslim Sunni Moderat dalam Menangkal Gerakan Ektrimisme Jama'at Nusrat Al-Islam Wal-Muslimin (JNIM) di Pantai Gading." *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 23, no. 2 (2026): 233-247.



Abstract:

This study discusses the role of moderate Sunni Muslims in restraining the spread of extremism by Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) in Côte d'Ivoire. The research focuses on two main issues: the pattern of the jihadist Sahel network's expansion into northern Côte d'Ivoire, and the response of the Muslim community coordinated by Sunni Islamic organizations through proselytization, education, and strengthening social cohesion. This study employs a qualitative method based on literature review by examining scholarly articles and other related literature, and uses the Radicalization and Counter-Radicalization Theory to analyze radical influences and efforts to prevent them. The findings show that the threat to Côte d'Ivoire did not emerge abruptly, but developed as a spillover effect from conflicts in Mali and Burkina Faso, particularly through the northern border regions that are administratively weak and socioeconomically vulnerable. In this context, moderate Sunni Muslim communities, through religious organizations such as AMSCI, CODIS, and JEMCI, serve as ideological and social buffers by promoting a peaceful Islamic narrative, educating youth cadres, utilizing digital media, collaborating with the state, and involving Christian communities as a pluralistic nation. Nevertheless, the effectiveness of religious responses continues to depend on strengthening state presence, local economic development, and the governance of security in border areas.

Key Word: JNIM, Ivory Coast, Moderate Sunni Muslim Community, Radicalism

Abstrak

(Perluasan gerakan islam ekstrimisme di pesisir barat Afrika yang dipelopori Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) menjadi ancaman yang cukup besar bagi keamanan negara terutama Pantai gading. Oleh karenanya perlu ada strategi untuk menahan Gerakan ini. penelitian sebelumnya memperlihatkan Langkah dari sisi keamanan negara saja. Sedangkan pada penelitian ini akan ditinjau dari peran Muslim Sunni moderat di Pantai Gading untuk menangkai perluasan pengaruh ekstrimisme. Penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan Teknik pengumpulan data melalui studi literatur dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mengkaji berbagai literatur yang mendukung kemudian dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara deskriptif-analitis serta menggunakan teori Radicalization and Counter-Radicalization Theory untuk proses analisisnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa ancaman terhadap Pantai Gading tidak lahir secara mendadak, melainkan berkembang melalui efek konflik dari Mali dan Burkina Faso dengan memanfaatkan lemahnya administratif dan sosial-ekonomi. Untuk itu masyarakat muslim di Pantai gading melalui organisasi keagamaan seperti AMSCI, CODIS, dan JEMCI berperan sebagai penyangga ideologis dan sosial melalui narasi Islam damai, pendidikan kader muda, pemanfaatan media digital, serta kerja sama dengan negara dan melibatkan umat Kristen sebagai negara plural. Meski demikian, efektivitas respons keagamaan tetap bergantung pada penguatan kehadiran negara, pembangunan ekonomi lokal, dan tata kelola keamanan di wilayah perbatasan.)

Kata Kunci:

Kata Kunci: JNIM, Pantai Gading, Komunitas Muslim Sunni Moderat, Radikalisme

Pendahuluan

Pembentukan Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) pada 2 Maret 2017 menandai konsolidasi penting dalam spektrum jihadisme yang berafiliasi Al-Qaeda di

Sahel.¹ Pantai Gading awalnya tidak dipandang sebagai pusat konflik jihadisme. Namun, posisinya yang berbatasan dengan Burkina Faso dan kedekatannya dengan dinamika keamanan Mali membuat negara ini rentan terhadap efek limpahan konflik dari pasukan ekstrimisme. Hal ini ditandai dengan Serangan di Grand-Bassam salah satu wilayah Pantai gading pada Maret 2016 memperlihatkan bahwa jaringan JNIM yang berafiliasi dengan AQIM (Al-Qaeda di Maghreb Islam) dan Al-Mourabitoun telah mampu menjangkau wilayah Pantai Gading, meskipun serangan ini terjadi sebelum organisasi dibentuk secara formal. Namun Setelah resmi terbentuknya serangkaian insiden di Kafolo 2020-2021 di kawasan perbatasan utara Pantai gading memperkuat indikasi bahwa ancaman jihadisme bergerak dari Sahel, Mali, Burkina Faso, dan Pantai Gading menuju negara-negara pesisir Afrika Barat.² Kondisi ini menunjukkan kerentanan keamanan wilayah oleh serangan Ekstrimisme.

Masyarakat muslim yang di pelopori oleh aktor keagamaan lokal memegang posisi yang penting ditengah indikasi dan ancaman kelompok bersenjata ini. Secara demografis Pantai Gading memiliki komunitas Muslim yang besar dan beragam tetapi tidak homogen. dengan persentase populasi penduduk 29,4 juta, yang didominasi oleh masyarakat muslim yang diperinci dengan 38,6% beragama muslim, diikuti oleh populasi Kristen 32,8%, dan terakhir 28% agama animisme.³ Maka peran umat muslim sangat berpengaruh untuk merespon gerakan JNIM melalui gerakan islam. Namun mayoritas muslim yang mendominasi tidak tepat menyederhanakan seluruh umat Muslim sebagai satu blok yang seragam. Oleh karena itu, Kajian ini memfokuskan perhatian pada ulama dan organisasi Sunni moderat yang memilih jalur legal, dakwah, pendidikan, dan kerja sosial sebagai strategi menghadapi ekstremisme. Dalam literatur, sebagian organisasi ini memiliki akar reformis-Salafi, tetapi dalam konteks Pantai Gading mereka cenderung berkembang sebagai aktor non-kekerasan yang menegaskan jarak dari jihadisme bersenjata.⁴

Beberapa studi terkini menunjukkan bahwa strategi penanggulangan ekstremisme di Afrika Barat sering kali terjebak pada pendekatan keamanan konvensional yang mengandalkan ketahanan militer semata.⁵ Padahal, di negara-negara seperti Pantai Gading, ancaman dari kelompok seperti JNIM (Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin) tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga ideologis yang menysar akar rumput. Oleh karenanya, mengkaji peran organisasi Muslim lokal menjadi sangat krusial sebagai penyedia strategi alternatif dalam membendung pengaruh JNIM.

¹ Tin Kapetanovic, "Applying the Transplantation Framework to JNIM's Expansion in the Sahara-Sahel: A Criminological Lens," *Journal of Illicit Economies and Development* 7, no. 1 (2025): 1–19, <https://doi.org/10.31389/jied.253>.

² Boubacar Haidara, "The Spread of Jihadism in the Sahel. Part 1," *Zeitschrift Für Außen- Und Sicherheitspolitik* 16, no. 4 (2023): 365–76, <https://doi.org/10.1007/s12399-023-00969-1>.

³ Executive Summary, "Cote D'ivoire 2023 International Religious Freedom Report Section I . Religious Demography," 2023.

⁴ Frédérick Madore, "The New Vitality of Salafism in Côte d ' Ivoire : Toward a Radicalization of Ivoirian Islam ?," *Journal of Religion in Africa* 46, no. 4 (2016): 417–52.

⁵ Oluranti Amson Afowowe, "The Dynamics Of Terorism And Counter-Terrorism: The South Africa Experience," *Journal of Terrorism Studies* 7, no. 2 (November 30, 2025), <https://doi.org/10.7454/jts.v7i2.1094>.

Penelitian sebelumnya juga memperlihatkan Upaya yang dilakukan untuk menangkal Gerakan ekstrimisme di Pantai Gading dilihat dari sisi kemampuan infrastruktur, kemampuan operasional pertahanan dan keamanan, serta Langkah social seperti pemberdayaan Perempuan, integrasi social para pemuda, dan pemberantasan kemiskinan.⁶ Hal ini menunjukkan strategi untuk melawan Gerakan ekstrimisme dilakukan dari sisi keamanan negara serta nilai social yang hadir di Tengah Masyarakat. Berbeda dengan Penelitian yang akan dilakukan pada artikel ini kami akan mengurai lebih eksplisit melalui sudut pandang Masyarakat muslim Sunni Moderat yang diwakili oleh organisasi Masyarakat muslim di Pantai gading untuk menangkal Gerakan ekstrimisme, Selain itu kami menggunakan istilah “Sunni Moderat” untuk menggambarkan komunitas Muslim di Pantai Gading yang secara historis memiliki tingkat toleransi sangat tinggi. Kehadiran organisasi Muslim moderat ini berfungsi sebagai benteng sosial yang mencegah infiltrasi ideologi radikal, mengingat rekam jejak mereka yang mampu hidup berdampingan secara harmonis dengan komunitas Kristen tanpa diskriminasi.⁷

Berangkat dari latar belakang tersebut, artikel ini akan menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana ekspansi JNIM dan jaringan Ektrimisme yang terkenal Jihadisme Sahel membentuk ancaman keamanan di Pantai Gading Kedua, bagaimana Masyarakat muslim Sunni moderat berperan dalam menangkal penyebaran pengaruh ideologis kelompok tersebut. Argumen utama tulisan ini adalah bahwa respon masyarakat muslim melalui otoritas ulama Sunni moderat berfungsi sebagai benteng normatif dan sosial terhadap radikalisasi, tetapi efektivitasnya akan terbatas apabila tidak ditopang oleh kebijakan negara yang memperkuat keamanan perbatasan, keadilan sosial, dan pembangunan wilayah utara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis berbasis studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis dinamika penyebaran ekstremisme Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) di Pantai Gading serta peran masyarakat Muslim Sunni moderat dalam upaya kontra-radikalisasi. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari artikel jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga internasional seperti International Crisis Group dan NATO Strategic Direction-South Hub, serta berbagai publikasi akademik yang relevan dengan tema penelitian. Seluruh sumber dipilih secara purposif berdasarkan tingkat kredibilitas, relevansi, dan keterkaitannya dengan fokus kajian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji berbagai literatur yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara deskriptif-analitis untuk menemukan pola hubungan antara ekspansi JNIM dan strategi kontra-radikalisasi masyarakat Muslim Sunni moderat. Analisis penelitian ini menggunakan Radicalization and

⁶ Famoussa Coulibaly, “La Côte D'Ivoire Face Au Pêril Djihadiste : Quel Plan De Riposte ?,” 2023, 8.

⁷ Sereme Aboubakary and Maroning Salaming, “Contemporary Muslim-Christian Interaction in Ivory Coast,” *Dirasat: Human and Social Sciences* 49, no. 4 (2022): 539–51, <https://doi.org/10.35516/hum.v49i4.2109>.

Counter-Radicalization Theory.⁸ di mana teori radikalisasi digunakan untuk menjelaskan proses perkembangan ideologi ekstrem dan perluasan jaringan JNIM, sedangkan teori kontra-radikalisasi digunakan untuk menganalisis berbagai strategi pencegahan yang dilakukan oleh organisasi seperti AMSCI, CODIS, dan JEMCI melalui narasi Islam moderat, pendidikan, kaderisasi pemuda, pemanfaatan media digital, serta kolaborasi dengan negara dan komunitas lintas agama.

Hasil dan Pembahasan

1. JNIM Dan Perluasan Ekstrimisme Ke Pantai Gading

JNIM atau Jama'at Nusrat Al-Islam Wal-Muslimin merupakan hasil penggabungan sejumlah sub kelompok jihadisme yang sebelumnya bergerak secara terpisah di Sahel. JNIM dibentuk melalui penyatuan empat kelompok militan yang memiliki afiliasi dengan al-Qaeda, yakni Front Pembebasan Macina (FLM), Ansar Dine, al-Mourabitoun, dan Emirat Sahara al-Qaeda di Maghreb Islam (AQIM). Pembentukan koalisi ini secara resmi diumumkan melalui sebuah video pada 2 Maret 2017, yang menampilkan para pemimpin masing-masing faksi Amadou Koufa (FLM), Djamel Okacha (AQIM), Iyad Ag Gali (Ansar Dine), dan Muhammad Ould Nouini (al-Mourabitoun) yang menyatakan secara langsung berdirinya JNIM.⁹

Tujuan utama penggabungan organisasi ini dalam sebuah organisasi besar JNIM Adalah untuk memperkuat kendalanya atas sebagian besar wilayah Mali, sehingga menciptakan tempat perlindungan yang stabil dan aman.¹⁰ Selain itu, salah satu bentuk upaya menonjolkan keberagaman etnis dan kesatuan ideologis sebagai strategi membedakan diri dari kelompok islam ekstrim rivalnya di Sahel yaitu ISGS (Islamic State in the Greater Sahara) yang sama-sama beroperasi di wilayah Sahel, termasuk Mali, Niger, dan Burkina Faso. sekaligus mempertahankan otonomi operasional dan jaringan dukungan lokal yang luas di antara komunitas Tuareg, Fulani, Arab, dan kelompok lainnya di Sahel.¹¹

Pembentukan JNIM memberikan Konsolidasi penting karena membuat gerakan jihadisme di Sahel tidak lagi sekadar fragmentasi saja, melainkan mereka memiliki struktur koordinasi yang lebih jelas, jaringan operasi yang lebih luas, dan kapasitas propaganda yang lebih efektif. Dan dibuktikan dengan mulai menyebarnya aktivitas gerakan ini dalam beberapa negara seperti aktivitasnya di negara-negara Niger, Burkina Faso, Togo, Pantai Gading, Ghana, dan Benin. Ekspansi kelompok ini tidak didorong oleh ideologi semata. kelompok jihadis di Sahel memiliki strategi untuk memperluas gerakannya dengan memanfaatkan ruang kosong negara, jalur penyelundupan, pertambangan emas, konflik antarkomunitas, dan keterbatasan layanan publik. Karena itu, ancaman jihadisme lebih tepat

⁸ T. Brown, K. E., & Saeed, "Radicalization and Counter-Radicalization at British Universities: Muslim Encounters and Alternatives. *Ethnic and Racial Studies*," *Ethnic and Racial Studies* 38(11) (2015): 1952–1968, <https://doi.org/10.1080/01419870.2014.911343>.

⁹ Djallil Lounnas, "Jihadist Groups in North Africa and the Sahel : Between Disintegration, Reconfiguration and Resilience," no. 16 (2018).

¹⁰ Kapetanovic, "Applying the Transplantation Framework to JNIM's Expansion in the Sahara-Sahel: A Criminological Lens."

¹¹ Frederick Appiah Afriyie, "A Tale of Two Jihads : Desvendando As Atrocidades Do Estado Islâmico No Grande Saara (Isgs) E Jama ' At Nasr Al-Islam Wal Muslimin (Jnim) No Sahel," 2023, 244–71.

dipahami sebagai gabungan antara militansi ideologis, ekonomi kekerasan, dan eksploitasi terhadap tata kelola yang lemah.¹²

Perluasan jangkauan serangan kelompok militan ke wilayah Pantai Gading saat ini telah bertransformasi menjadi ancaman keamanan nasional yang sangat serius. Titik paling krusial dari ancaman ini terletak di sepanjang perbatasan utara, yang secara geografis dan sosiopolitik merupakan wilayah yang sangat rentan. Kerentanan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berakar pada kondisi masyarakat setempat yang selama ini merasa terpinggirkan dari pemerintah. Penduduk di wilayah utara Pantai Gading sebagian besar adalah pemeluk agama Muslim yang sering kali tidak di perhatikan dalam pembagian sumber daya ekonomi, sehingga menciptakan kesenjangan kesejahteraan yang tajam dibandingkan dengan wilayah selatan yang lebih maju.¹³ Hal ini memberikan ruang ke JNIM untuk memperluas gerakannya ke wilayah Pantai Gading karena terdapat beberapa wilayah yang memiliki tata Kelola lemah di wilayah utara.

Eskalasi ancaman terorisme di Pantai Gading menandai pergeseran signifikan dalam peta keamanan negara. Jejak kekerasan ini dimulai secara dramatis melalui serangan perdana yang mengguncang ketenangan wilayah pesisir Grand-Bassam pada 13 Maret 2016. Dalam peristiwa tersebut mengakibatkan 19 orang tewas dan melukai puluhan lainnya.¹⁴ Meskipun secara kronologis serangan ini terjadi setahun sebelum pembentukan formal Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) pada 2017, peristiwa ini tidak dapat dipandang sebagai insiden yang berdiri sendiri.

Keterlibatan jaringan AQIM (Al-Qaeda in the Islamic Maghreb) dan faksi Al-Mourabitoun dalam tragedi Grand-Bassam menunjukkan adanya kesinambungan genealogis yang kuat. Serangan tersebut merupakan manifestasi dari ambisi kelompok-kelompok jihadis untuk memperluas jangkauan operasional mereka dari wilayah Sahel menuju negara-negara pesisir Teluk Guinea. Analisis intelijen menunjukkan bahwa elemen-elemen yang merencanakan serangan ini adalah aktor-aktor kunci yang kemudian melakukan fusi atau konsolidasi ke dalam struktur JNIM. Dengan demikian, Grand-Bassam berfungsi sebagai "pintu masuk" sekaligus pernyataan eksistensi bahwa jaringan Al-Qaeda memiliki kemampuan logistik untuk menyerang Pantai Gading.

Setelah periode jeda yang relatif tenang di wilayah perkotaan, pola ancaman mengalami transformasi menjadi serangan kedua yang bersifat infiltrasi bertahap di kawasan perbatasan utara. Berbeda dengan serangan spektakuler di pesisir, taktik baru ini lebih fokus pada perang atrisi dan penguasaan wilayah terpencil. Serangan mematikan di Kafolo pada tahun 2020 dan 2021 menjadi titik balik krusial. Insiden ini membuktikan bahwa wilayah utara Pantai Gading telah masuk sepenuhnya dalam kalkulasi operasional kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan JNIM, yang bergerak melintasi batas-batas negara yang rapuh dari Burkina Faso.¹⁵

¹² Tunjung dkk Wijanarka, *Kajian Isu-Isu Kontemporer Afrika*, ed. M.A. Tunjung Wijanarka, S.Hub.Int., M.A. Christian H. J. de Fretes, S.IP., and M.A. Ni Nyoman Clara Listya Dewi, S.IP., pertama (Satya Wacana University Press, 2025).

¹³ Kathrin Heitz-Tokpa, "Mande Hunters and the State: Cooperation and Contestation in Post-Conflict Côte d'Ivoire," *African Studies Review* 62, no. 1 (2019): 148–72, <https://doi.org/10.1017/asr.2018.143>.

¹⁴ Haidara, "The Spread of Jihadism in the Sahel. Part 1."

¹⁵ Dirk Kohnert, "Outside Sources of Terrorist Threats in West Africa," *SSRN Electronic Journal*, no. November (2022): 1–31, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4272976>.

Kerentanan Pantai Gading bukan hanya soal perbatasan wilayah yang berdekatan dengan sahel, tetapi juga karena adanya kantong-kantong sosial-ekonomi yang tertinggal, lemahnya kehadiran administrasi negara, dan hubungan yang belum sepenuhnya kuat antara aparat keamanan dan warga lokal.¹⁶ keberhasilan infiltrasi ini adalah hubungan yang belum sepenuhnya kuat antara aparat keamanan dan warga lokal. Di banyak wilayah perbatasan, kehadiran militer sering kali dipandang dengan rasa curiga alih-alih sebagai pelindung. Kurangnya dialog dan kolaborasi antara intelijen negara dengan komunitas akar rumput menyebabkan deteksi dini terhadap pergerakan aktor mencurigakan menjadi sangat lemah. Tanpa adanya kepercayaan yang kokoh, warga lokal cenderung bersikap pasif atau, dalam kondisi terjepit, terpaksa berkolaborasi dengan kelompok bersenjata demi kelangsungan hidup. Ketimpangan hubungan inilah yang pada akhirnya mempermudah JNIM untuk menjadikan wilayah utara sebagai basis logistik dan rekrutmen untuk penyebaran ektrimisme.

2. Lanskap Masyarakat Sunni Moderat di Pantai Gading

Pantai gading atau sekarang dikenal dengan negara Côte d'Ivoire di dominasi oleh mayoritas muslim madzhab maliki.¹⁷ Masyarakat muslim di negara ini dalam sejarahnya mengikuti ajaran salafi yang kemudian bertransformasi ke sunni. Ajaran Islam dibesarkan oleh Salafi Orthodox yang menjadi cikal bakal awal Perkembangan aliran Sunni di Pantai Gading, berangkat dari pada dominasi awal gerakan Salafi yang terorganisasi melalui *Association des Musulmans Orthodoxes de Côte d'Ivoire* (AMOCI) komunitas muslim pertama di negara ini yang memiliki ajaran muslim Orthodox yang memiliki ideologi salafi berdiri sejak tahun 1970-an. perkembangannya AMOCI memiliki sifat kecenderungan eksklusivisme dan sikap sektarian terhadap praktik keagamaan Muslim lain yang dianggap tidak sesuai dengan Ortodoksi. Oleh karenanya komunitas ini tidak berjalan lama dan menimbulkan dinamika internal organisasi Islam seperti krisis berkepanjangan pada dekade 1980-an, mendorong terjadinya transformasi ideologis dan organisatoris.¹⁸ Konflik internal ini menjadi Momentum dan memberikan ruang bagi para tokoh Muslim Sunni moderat untuk muncul dan merespons sikap non-moderat kelompok Salafi ortodoks. Alhasil, orientasi keagamaan di Pantai Gading bertransformasi menjadi lebih inklusif dan moderat.

Perubahan signifikan terjadi dengan munculnya generasi intelektual baru, seperti Moustapha Sy dan Salia Bamba, yang berkontribusi dalam mengarahkan gerakan menuju pendekatan islam yang lebih moderat, inklusif, dan akomodatif terhadap keragaman praktik Islam, termasuk tradisi Sufisme. Transformasi ini ditandai secara institusional melalui perubahan nama organisasi besar AMOCI menjadi *Association des Musulmans Sunnites de Côte d'Ivoire* (AMSCI) pada tahun 1997 (diresmikan pada 2001), sebagai upaya Redefinisi identitas muslim salafi Orthodox ke muslim yang lebih moderat serta perluasan legitimasi nilai-nilai tersebut dalam Sosial-keagamaan.¹⁹

¹⁶ Abidjan/Brussels, "Keeping Jihadists Out of Northern Côte d'Ivoire," *International Crisis Group*, no. August (2023): 1–20.

¹⁷ Issouf Binaté et al., "Religious Diversity and Modes of Coexistence in Urban West Africa," *MLASA (Merian Institute For Advanced Studies In Africa)* 2023 (2023), <https://www.ug.edu.gh/mias-africa/>.

¹⁸ Madore, "The New Vitality of Salafism in Côte d'Ivoire : Toward a Radicalization of Ivoirian Islam ?"

¹⁹ Madore.

AMSCI merupakan komunitas muslim yang berupaya menjadi suara resmi Muslim Sunni dalam dialog keagamaan dan sosial di negara Pantai gading serta menyerukan perdamaian dan mendorong keterlibatan komunitas Muslim dalam proses rekonsiliasi nasional negara tanpa kekerasan yang beranggotakan Siswa, mahasiswa, pemuda Muslim yang berada dibawah naungan dewan tertinggi imam di Pantai Gading COSIM (Conseil Supérieur des Imams). Dalam perkembangannya AMSCI sudah menempati posisi penting sebagai salah satu organisasi Sunni yang berkembang dari tradisi reformis. Frédérick Madore menunjukkan bahwa dinamika internal gerakan ini pada 1990-an dan 2000-an mengarah pada penguatan organisasi, pembinaan kader, ekspansi pendidikan, dan pencarian legitimasi publik, bukan pada pembenaran kekerasan. Bahkan ketika memiliki akar Salafi, gerakan ini lebih tepat dipahami sebagai arus legalis dan dakwahis daripada gerakan militan.²⁰

Untuk melengkapi perannya, AMSCI memperluas ajarannya dengan membentuk struktur khusus pemuda dalam jaringan reformis Muslim yang berada dalam satu naungan JEMCI (Association des Jeunes Musulmans de Côte d'Ivoire).²¹ organisasi ini lahir dari kebutuhan komunitas untuk memodernisasi praktik Islam dan memperluas keterlibatan pemuda yang berada di bawah naungan AMSCI. Komunitas bawahan ini berjalan dari awal 1990-an hingga pasca-2002, JEMCI bertransformasi dari asosiasi komunitas menjadi aktor sosial-keagamaan yang signifikan di Côte d'Ivoire seperti menggunakan media, pendidikan, proyek sosial sebagai alat dakwah dan penguatan identitas Muslim. Organisasi ini difokuskan kepada Pemuda Muslim yang tidak lagi bersekolah, yang ingin aktif dalam dakwah, pendidikan, dan kegiatan sosial di komunitas mereka.²² Hal ini membuktikan proses penyebaran islam sunni di Pantai gading bukan hanya kepada dalam dunia Pendidikan saja, bahkan generasi pemuda yang tidak melanjutkan Pendidikan diberikan wadah dalam perhimpunan pemuda JEMCI untuk belajar dan menyebarkan islam sunni melalui media dakwah atau komunitas.

pada September 2005, sejumlah imam yang tergabung dalam AMSCI (Association des Musulmans de Côte d'Ivoire) mengambil langkah signifikan dengan menarik diri dari dewan tertinggi imam atau dikenal COSIM (Conseil Supérieur des Imams) sebagai otoritas agama Muslim Sunni tertinggi di Pantai Gading. Keputusan ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pandangan ideologis dan metode pengelolaan komunitas antara imam-imam AMSCI dengan COSIM, yang dianggap terlalu formalistik, konservatif dalam menangani isu-isu sosial-keagamaan di tengah dinamika masyarakat Muslim yang semakin plural dan terpolarisasi secara politik. Selain itu Langkah ini diambil Untuk menegaskan independensi mereka dan memberikan alternatif kepemimpinan agama. Kemudian para imam AMSCI mendirikan Conseil des Imams Sunnites (CODIS) atau Dewan Imam Sunni, sebuah organisasi paralel yang bertujuan memperkuat peran imam-imam Sunni dalam pendidikan

²⁰ Madore.

²¹ S. E. (2021). Westermann, K., Woud, M. L., Cwik, J. C., Graz, C., Nyhuis, P., Margraf, J., & Blackwell, "Sudy Of The Communication Of Islamic Religious Organizations In Cote D'ivoire," *International Journal of Contemporary Applied Researches* 8, no. 1 (2021): 6.

²² Marie Nathalie LeBlanc, "Piety, Moral Agency, and Leadership: Dynamics Around the Feminization of Islamic Authority in Côte d'Ivoire," *Islamic Africa* 5,2 (n.d.): 167–98, <https://doi.org/https://doi.org/10.5192/215409930502167>.

Islam, pengelolaan masjid, dan koordinasi kegiatan dakwah.²³ Organisasi ini menunjukkan perlawanan terhadap dewan imam sebelumnya COSIM dan menguatkan komunitas muslim moderat yang terorganisir ke dalam satu komunitas dan turunannya.

Transformasi ini krusial karena menegaskan batas antara salafisme legalis dan jihadisme bersenjata. Melalui organisasi AMSCI serta komunitas CODIS dan JEMCI, gerakan ini secara eksplisit menolak penggantian kekuasaan negara lewat jalur kekerasan. Fokus mereka beralih pada penguatan otoritas keagamaan secara institusional melalui pengelolaan masjid, madrasah, penyelenggaraan seminar, pelatihan pemuda, serta pemanfaatan media. Dengan menyediakan saluran keberagamaan yang sah, terorganisasi, dan mudah diakses, kelompok ini memberikan kontribusi nyata bagi stabilitas nasional bukan sekadar melalui retorika penyangkalan terorisme, melainkan dengan membangun ekosistem religi yang tertib hukum bagi masyarakat Muslim di Pantai Gading.

Aspek lain yang memperkuat posisi mereka ialah keterlibatan dalam ruang publik yang lebih luas. Pantai Gading memiliki pengalaman kerja sama antaragama yang relatif menonjol. Forum lintas agama dan komunikasi dengan otoritas negara membantu meredam polarisasi serta memperkuat pesan bahwa ancaman jihadisme harus dihadapi sebagai persoalan nasional, bukan semata-mata isu internal komunitas Muslim.²⁴ Kehadiran umat muslim sunni moderat yang berada di bawah naungan AMSCI memiliki peranan penting untuk memberikan ajaran sunni dalam ruang yang cukup luas melalui organisasi pendukungnya seperti CODIS dan JEMCI.

3. Strategi Masyarakat Muslim Sunni Moderat dalam Menangkal Pengaruh JNIM

Ekstremisme di Pantai Gading harus dimulai dengan memahami peran sentral otoritas keagamaan sebagai basis legitimasi sosial. Max Weber mengemukakan Otoritas keagamaan merupakan hasil legitimasi yang membuat ajaran dan kepemimpinan agama ditaati oleh masyarakat. Legitimasi itu bisa berasal dari tradisi, kualitas personal pemimpin, atau aturan formal dalam sistem keagamaan.²⁵ Oleh karena itu untuk mengetahui Strategi atau pola masyarakat muslim untuk menangkal Ekstremisme di Pantai Gading akan dilihat dari peran otoritas keagamaan melalui Ormas Islam yang diterima oleh masyarakat seperti AMSCI, CODIS, dan JNIM. Analisis ini juga berangkat dari dorongan utama ekstrimisme terus berkembang dari masa ke masa disebabkan oleh rekayasa fundamentalisme islam.²⁶ Sehingga melihat strategi yang dilakukan oleh kelompok muslim di Pantai gading menjadi penting dilihat dari segi otoritas keagamaan yang mewakili masyarakat muslim di negara tersebut.

Kerentanan serangan oleh gerakan Ekstremisme yang dipelopori oleh JNIM menjadi ancaman bagi masyarakat Pantai gading. Untuk itu peran organisasi AMSCI yang secara struktur sudah terbilang besar dan independent di negara tersebut menjadi penting untuk melihat bagaimana peran mereka sebagai komunitas islam sunni untuk merespon gerakan

²³ LeBlanc.

²⁴ Irene Sackey and Guo Dexia, "The Politics of Ethnicity and Religion in Africa: A Comparative Study of Ghana and Cote D'Ivoire," *Journal of Educational Research and Policies* Volume 3 I (2021).

²⁵ Rüdiger Lohker and Soleh Hasan Wahid, "The Transformation of Islamic Religious Authority," *Religions* 17, no. 4 (2026): 1–22, <https://doi.org/10.3390/rel17040493>.

²⁶ Afowowe, "The Dynamics Of Terrorism And Counter-Terrorism: The South Africa Experience."

islam ekstrim yang mulai melakukan pergerakan ke daerah perbatasan Pantai gading. peran muslim sunni memang tidak terlihat secara langsung dalam konflik penyebaran islam ekstrim. Namun penyebaran ajaran islam moderat melalui AMSCI memberikan dampak besar bagi masyarakat muslim di Tengah kerentanan wilayah oleh aksi islam aliran keras. Selain itu Otoritas ini menjadi tameng utama dalam menghadapi penetrasi kelompok radikal seperti JNIM yang mencoba merongrong kedaulatan ideologis melalui manipulasi simbol-simbol Islam. Namun Strategi AMSCI dalam mempertahankan nilai islam yang moderat bukan sekadar upaya teologis, melainkan sebuah gerakan sistematis untuk menjaga stabilitas negara dari ancaman fundamentalisme hasil rekayasa yang bertujuan memecah belah bangsa. Hal ini terlihat dari delegitimasi ideologi Melalui khutbah, seminar, majelis taklim, dan pernyataan publik. Para ulama sejak awal sudah menegaskan bahwa terorisme tidak memiliki legitimasi dalam Islam.²⁷ Sedangkan JNIM berupaya meminjam simbol dan istilah agama untuk membenarkan kekerasan. Namun, Ketika otoritas keagamaan lokal dari awal sudah mengoreksi klaim tersebut secara terbuka, ruang legitimasi bagi propaganda jihadis menjadi menyempit.

Pola pencegahan ini kemudian diturunkan ke level akar rumput, khususnya menyasar kelompok paling rentan generasi muda. Melalui sayap pemudanya Ajaran islam moderat versi sunni sudah diperlihatkan oleh AMSCI melalui komunitas pemuda JEMCI seperti pembinaan generasi muda melalui madrasah, pelatihan, forum mahasiswa, dan seminar kepemudaan. Fokus pada kaum muda penting karena kelompok ekstremis umumnya menarget kelompok usia ini melalui janji identitas, solidaritas, dan mobilitas sosial. Pendidikan keagamaan yang menekankan tauhid, akhlak, ketaatan pada hukum, dan penolakan terhadap takfirisme berfungsi sebagai vaksin ideologis terhadap radikalisisasi.

Kajian tentang Islam moderat di negara ini bukan selesai di ranah kajian kelompok atau forum diskusi mereka juga memanfaatkan media social untuk menyebarkan islam yang lebih moderat. Dalam situasi ancaman ekstremisme yang terjadi pemanfaatan media digital dapat memungkinkan ulama dan organisasi Islam menyebarkan kontra-narasi secara cepat, terutama untuk menjangkau pemuda urban dan masyarakat yang aktif di ruang digital.²⁸ Strategi ini juga penting pasalnya Aksi teror atau ancaman ektrimisme akan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang terus berkembang seperti penyebaran ajarannya di sosial media atau melalui sabotase yang dilakukan di dunia maya baik melalui pengiriman virus maupun pengambilan alih kontrol kendali dari sebuah sistem jaringan yang akan berdampak sangat luas di masyarakat.²⁹ Sehingga serangan Syber di dunia internet terlihat dari perkembangan teknologi seperti serangan Syber Boko Haram terhadap penggunaan internet untuk penyebaran Radikalisasi.³⁰ Untuk itu penyebaran islam moderat di media sosial bisa menjadi kolaborasi untuk menangkal gerakan Islam Ekstrimisme dengan memadukan nilai-nilai Islam dengan media social.

²⁷ Frédéric Madore and Issouf B Inaté, "Islam on University Campuses in Côte d' Ivoire since the 1970s : Muslim Intellectuals and Francophone Salafism" 1 (2023): 39–58.

²⁸ Frédéric Madore, "L'Islam Ivoirien Et Burkinabe À L'Ère Du Numerique 2.0," *Journal Des Anthropologues*, 2016, 146–47.

²⁹ Agung; Sukoco and Syauqillah Muhamad and Ismail Asep Usman, "Media, Globalisasi Dan Ancaman Terorisme," *Journal of Terrorism Studies* 3, no. 2 (November 30, 2021), <https://doi.org/10.7454/jts.v3i2.1039>.

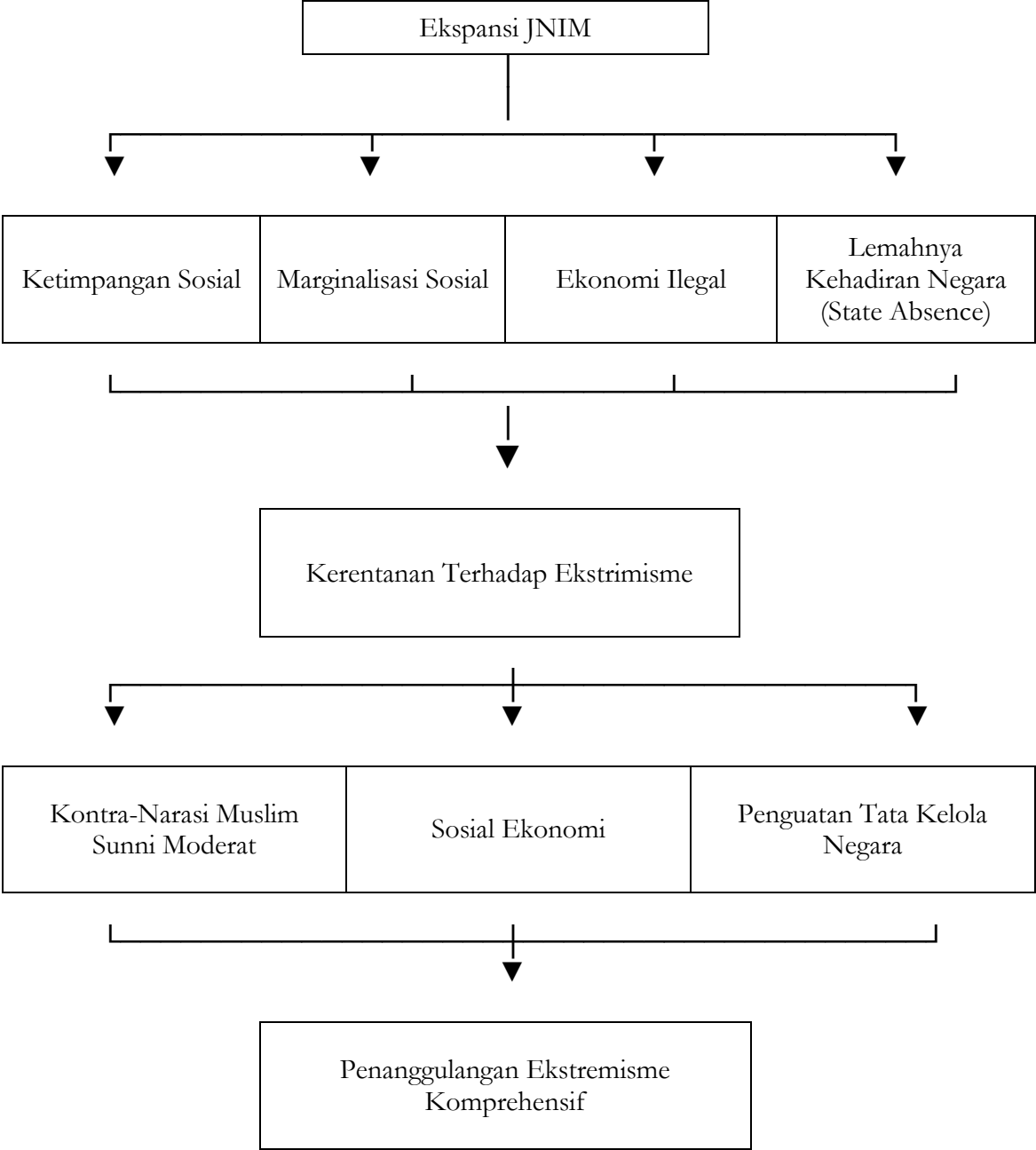
³⁰ Abraham Ename Minko, "Emerging Technologies In Boko Haram's Operations And Counter-Terrorism Efforts In Central Africa," *Journal of Terrorism Studies* 7, no. 1 (May 25, 2025), <https://doi.org/10.7454/jts.v7i1.1086>.

Penduduk Pantai Gading yang dikenal dengan masyarakat plural memiliki ruang untuk melakukan kolaborasi agama non muslim dan kelembagaan. Oleh karena itu kelompok muslim tidak bergerak sendiri untuk menangkal gerakan ekstrim yang sedang mengancam Pantai gading. komunitas Islam moderat, Kristen dan pemerintah bersatu melalui program pembangunan sosial-ekonomi, pendidikan, dan resolusi konflik lokal untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap penetrasi ideologi Islam ekstrem. Kolaborasi lintas-agama ini memastikan akses yang setara terhadap layanan dasar bagi seluruh warga, membangun kepercayaan antara komunitas dan pemerintah, serta menyediakan alternatif bagi pemuda agar tidak direkrut oleh kelompok ekstremis. Hal ini terlihat pada November 2021, pemerintah Pantai Gading mengumumkan proyek besar di wilayah perbatasan utara yang mencakup pengembangan sektor kesehatan, pendidikan, dan penciptaan peluang kerja baru. Proyek ini dimaksudkan memberikan alternatif untuk mencegah ekstremisme kekerasan kepada pemuda di komunitas rentan. Selain itu juga, kelompok lokal seperti asosiasi pemburu Dozo yang mayoritas beragama Kristen telah bekerja sama dengan kelompok Islam moderat untuk menahan pengaruh kelompok ekstremis.³¹ Hal ini membuktikan organisasi islam tidak hanya bergerak sendiri, akan tetapi berkolaborasi dengan umat Kristen untuk menangkal gerakan ekstrimisme.

Meskipun peran komunitas Muslim Sunni moderat dalam melakukan kontra-narasi sangat krusial dalam menangkal Ekstrimisme, efektivitas respons muslim melalui komunitas muslim tersebut tidak boleh dipandang secara reduksionis seolah mampu mengeliminasi akar permasalahan secara total. Terdapat kecenderungan penyederhanaan dalam berbagai literatur yang beranggapan bahwa penguatan melalui ideologi islam moderat merupakan solusi tunggal yang memadai. Namun, perspektif tersebut cenderung mengabaikan kompleksitas kausalitas di lapangan. Eksistensi dan ekspansi kelompok seperti JNIM tidak semata-mata berakar pada pengaruh propaganda teologis, melainkan hasil dari pemanfaatan strategis terhadap ketimpangan struktural, marginalisasi sosial, serta dinamika ekonomi ilegal. Lebih jauh lagi, gerakan ini diperparah oleh krisis legitimasi akibat lemahnya kehadiran negara (*state absence*) di wilayah-wilayah rentan. Oleh karena itu, pendekatan teologis harus diintegrasikan dengan penyelesaian problematika sosio-ekonomi dan penguatan tata kelola pemerintahan untuk mencapai resolusi konflik yang komprehensif. seperti yang tergambar pada tabel berikut:

³¹ NATO Strategic Direction-South Hub & ACSRT, "The Contagion Of Violent Extremism In Wesr Africa Coastal States," 2022.

Table 1
Gambaran Integrasi Pendekatan Teologis dan Penyelesaian Masalah sosio-ekonomi



Dengan demikian, peran komunitas muslim baru efektif apabila bertemu dengan kebijakan publik yang tepat. Wilayah utara Pantai Gading membutuhkan investasi pada infrastruktur, pendidikan, kesempatan kerja, hubungan sipil-militer yang lebih sehat, serta pelayanan negara yang konsisten. Tanpa itu, narasi keagamaan yang moderat berisiko tidak cukup kuat untuk menandingi daya tarik kelompok bersenjata yang menawarkan

perlindungan, pendapatan, atau rasa memiliki kepada komunitas yang terpinggirkan. Karena itu, kontribusi muslim Sunni moderat sebaiknya diposisikan sebagai bagian dari strategi pencegahan yang lebih luas. Mereka penting sebagai aktor legitimasi moral dan sosial, tetapi ketahanan jangka panjang tetap mensyaratkan sinergi antara ulama, masyarakat lokal, dan negara.

Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa ekspansi JNIM ke Pantai Gading bukan merupakan fenomena spontan, melainkan hasil dari proses panjang yang dipengaruhi oleh konflik di Mali dan Burkina Faso, serta kelemahan administratif dan sosial-ekonomi wilayah perbatasan utara Pantai Gading. Serangan pertama di wilayah Pantai gading tepatnya di Grand-Bassam pada tahun 2016 dan infiltrasi Kafolo pada tahun 2020–2021 menggambarkan bagaimana jaringan jihadisme lintas batas memanfaatkan ruang kosong negara, konflik lokal, dan jalur ekonomi ilegal untuk memperluas pengaruhnya. Dengan demikian, ancaman yang ditimbulkan JNIM harus dipahami sebagai gabungan antara ideologi ekstrem, strategi militer-teritorial, dan eksploitasi terhadap kelemahan tata kelola negara.

Secara keseluruhan, artikel ini juga menegaskan bahwa ancaman JNIM di Pantai Gading merupakan bagian dari dinamika konflik Sahel yang bersifat lintas batas, yang berkembang melalui kombinasi faktor ideologis, kelemahan tata kelola negara, serta ketimpangan sosial-ekonomi di wilayah perbatasan utara. Dalam konteks tersebut, komunitas Muslim Sunni moderat yang direpresentasikan oleh organisasi seperti AMSCI, CODIS, dan JEMCI memainkan peran penting sebagai benteng ideologis dan sosial dalam menahan penetrasi ekstremisme. Melalui strategi dakwah damai, pendidikan keagamaan, kaderisasi pemuda, pemanfaatan media digital, serta kolaborasi lintas agama dan negara, mereka berhasil memperkuat narasi Islam moderat dan membatasi ruang legitimasi propaganda JNIM. Dengan demikian, peran ulama dan organisasi Islam moderat tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga operasional dalam membangun ketahanan sosial-keagamaan masyarakat Pantai Gading.

Namun, efektivitas respons Muslim moderat tetap terbatas jika tidak diiringi intervensi struktural dari negara, seperti pembangunan ekonomi lokal, peningkatan layanan publik, dan penguatan hubungan sipil-militer di wilayah perbatasan. JNIM mampu menarik dukungan karena menawarkan perlindungan, pendapatan, dan rasa memiliki bagi komunitas yang terpinggirkan. Oleh karena itu, strategi kontra-radikalisasi harus bersifat holistik, memadukan peran ulama dan organisasi keagamaan dengan kebijakan publik yang memperkuat legitimasi negara dan memperbaiki ketimpangan sosial-ekonomi. Analisis ini menegaskan bahwa ulama Sunni moderat adalah benteng ideologis penting, namun ketahanan jangka panjang menuntut sinergi antara agama, masyarakat, dan negara.

Kemudian beberapa keterbatasan yang ada di penelitian ini seperti Pendekatan yang digunakan berbasis studi kepustakaan (library research) membuat kajian ini tidak didukung oleh data lapangan secara langsung, sehingga kedalaman analisis terhadap praktik sosial di tingkat komunitas masih terbatas. Selain itu, fokus kajian yang lebih menitikberatkan pada peran aktor keagamaan Sunni moderat menyebabkan aspek lain seperti dinamika politik praktis, peran aktor non-keagamaan, serta faktor ekonomi mikro di tingkat lokal belum

terurai secara mendalam. Ketergantungan pada sumber-sumber sekunder juga membuka kemungkinan adanya variasi perspektif yang belum sepenuhnya dapat diverifikasi melalui data empiris. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan pendekatan lapangan seperti etnografi atau wawancara langsung diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai strategi kontra-radikalisasi di Pantai Gading.

Daftar Pustaka

- Abidjan/Brussels. "Keeping Jihadists Out of Northern Côte d'Ivoire." *International Crisis Group*, no. August (2023): 1–20.
- Aboubakary, Sereme, and Maroning Salaming. "Contemporary Muslim-Christian Interaction in Ivory Coast." *Dirasat: Human and Social Sciences* 49, no. 4 (2022): 539–51. <https://doi.org/10.35516/hum.v49i4.2109>.
- Afowowe, Oluranti Amson. "The Dynamics Of Terrorism And Counter-Terrorism: The South Africa Experience." *Journal of Terrorism Studies* 7, no. 2 (November 30, 2025). <https://doi.org/10.7454/jts.v7i2.1094>.
- Afriyie, Frederick Appiah. "A Tale of Two Jihads : Desvendando As Atrocidades Do Estado Islâmico No Grande Saara (Isgs) E Jama ' At Nasr Al-Islam Wal Muslimin (Jnim) No Sahel," 2023, 244–71.
- Binaté, Issouf, Yunus Dumbe, Musa Ibrahim, Nadine Sieveking, and Mariama Zaami. "Religious Diversity and Modes of Coexistence in Urban West Africa." *MLASA (Merian Institute For Advanced Studies In Africa)* 2023 (2023). <https://www.ug.edu.gh/mias-africa/>.
- Brown, K. E., & Saeed, T. "Radicalization and Counter-Radicalization at British Universities: Muslim Encounters and Alternatives. Ethnic and Racial Studies." *Ethnic and Racial Studies* 38(11) (2015): 1952–1968. <https://doi.org/10.1080/01419870.2014.911343>.
- Coulibaly, Famoussa. "La Côte D'Ivoire Face Au Péril Djihadiste : Quel Plan De Riposte ?," 2023, 8.
- Haidara, Boubacar. "The Spread of Jihadism in the Sahel. Part 1." *Zeitschrift Für Außen- Und Sicherheitspolitik* 16, no. 4 (2023): 365–76. <https://doi.org/10.1007/s12399-023-00969-1>.
- Heitz-Tokpa, Kathrin. "Mande Hunters and the State: Cooperation and Contestation in Post-Conflict Côte d'Ivoire." *African Studies Review* 62, no. 1 (2019): 148–72. <https://doi.org/10.1017/asr.2018.143>.
- Kapetanovic, Tin. "Applying the Transplantation Framework to JNIM's Expansion in the Sahara-Sahel: A Criminological Lens." *Journal of Illicit Economies and Development* 7, no. 1 (2025): 1–19. <https://doi.org/10.31389/jied.253>.
- Kohnert, Dirk. "Outside Sources of Terrorist Threats in West Africa." *SSRN Electronic Journal*, no. November (2022): 1–31. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4272976>.
- LeBlanc, Marie Nathalie. "Piety, Moral Agency, and Leadership: Dynamics Around the Feminization of Islamic Authority in Côte d'Ivoire." *Islamic Africa* 5,2 (n.d.): 167–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.5192/215409930502167>.
- Lohlker, Rüdiger, and Soleh Hasan Wahid. "The Transformation of Islamic Religious Authority." *Religions* 17, no. 4 (2026): 1–22. <https://doi.org/10.3390/rel17040493>.
- Lounnas, Djallil. "Jihadist Groups in North Africa and the Sahel : Between Disintegration,

- Reconfiguration and Resilience,” no. 16 (2018).
- Madore, Frédéric. “L’Islam Ivoirien Et Burkinabe À L’ère Du Numerique 2.0.” *Journal Des Anthropologues*, 2016, 146–47.
- . “The New Vitality of Salafism in Côte d’Ivoire : Toward a Radicalization of Ivoirian Islam?” *Journal of Religion in Africa* 46, no. 4 (2016): 417–52.
- Madore, Frédéric, and Issouf B Inaté. “Islam on University Campuses in Côte d’Ivoire since the 1970s : Muslim Intellectuals and Francophone Salafism” 1 (2023): 39–58.
- Minko, Abraham Ename. “Emerging Technologies In Boko Haram’s Operations And Counter-Terrorism Efforts In Central Africa.” *Journal of Terrorism Studies* 7, no. 1 (May 25, 2025). <https://doi.org/10.7454/jts.v7i1.1086>.
- NATO Strategic Direction-South Hub & ACSRT. “The Contagion Of Violent Extrimism In West Africa Coastal States,” 2022.
- Sackey, Irene, and Guo Dexia. “The Politics of Ethnicity and Religion in Africa: A Comparative Study of Ghana and Cote D’Ivoire.” *Journal of Educational Research and Policies* Volume 3 I (2021).
- Sukoco, Agung;, and Syauqillah Muhamad and Ismail Asep Usman. “Media, Globalisasi Dan Ancaman Terorisme.” *Journal of Terrorism Studies* 3, no. 2 (November 30, 2021). <https://doi.org/10.7454/jts.v3i2.1039>.
- Summary, Executive. “Cote D’ivoire 2023 International Religius Freedom Report Section I . Religious Demography,” 2023.
- Westermann, K., Woud, M. L., Cwik, J. C., Graz, C., Nyhuis, P., Margraf, J., & Blackwell, S. E. (2021). “Sudy Of The Communication Of Islamic Religious Organizations In Cote D’ivoire.” *International Journal of Contemporary Applied Researches* 8, no. 1 (2021): 6.
- Wijanarka, Tunjung dkk. *Kajian Isu-Isu Kontemporer Afrika*. Edited by M.A. Tunjung Wijanarka, S.Hub.Int., M.A. Christian H. J. de Fretes, S.IP., and M.A. Ni Nyoman Clara Listya Dewi, S.IP. Pertama. Satya Wacana University Press, 2025.